

**PERAN GLOBAL GOVERNANCE DALAM MENGATASI KRISIS IKLIM DAN  
MEMPERKUAT KEAMANAN INTERNASIONAL**

***THE ROLE OF GLOBAL GOVERNANCE IN OVERCOMING THE CLIMATE CRISIS  
AND STRENGTHENING INTERNATIONAL SECURITY***

**Iwan Gunawan**  
Universitas Pasundan  
iwan.gunawan@unpas.ac.id

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran global governance dalam mitigasi perubahan iklim dan dampaknya terhadap keamanan internasional. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai laporan internasional, dokumen kebijakan, dan artikel ilmiah yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa lembaga internasional seperti UNFCCC dan IPCC memainkan peran vital dalam merumuskan kebijakan mitigasi, namun tantangan dalam implementasi tetap ada, terutama terkait ketidaksetaraan antara negara maju dan berkembang. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa perubahan iklim berpotensi memperburuk ketidakstabilan politik dan meningkatkan risiko konflik, khususnya di wilayah-wilayah rentan. Selain itu, terdapat kesenjangan dalam tata kelola global yang menghambat upaya kolektif untuk mitigasi. Kolaborasi multilateral, melalui inisiatif seperti Green Climate Fund, menjadi solusi penting dalam memastikan partisipasi semua negara dalam mitigasi perubahan iklim. Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang inklusif dan adil dalam tata kelola global, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas mitigasi perubahan iklim dan memperkuat keamanan internasional. Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman dan pengembangan strategi yang lebih baik dalam menghadapi tantangan perubahan iklim di masa mendatang.*

**Kata Kunci:** *Global Governance, Perubahan Iklim, Keamanan, Mitigasi, Kolaborasi*

**ABSTRACT**

*This research aims to analyze the role of global governance in mitigating climate change and its impact on international security. Using qualitative descriptive methods, this research collects data from various international reports, policy documents and relevant scientific articles. The findings show that international institutions such as the UNFCCC and IPCC play a vital role in formulating mitigation policies, but challenges in implementation remain, especially regarding inequalities between developed and developing countries. This research also identifies that climate change has the potential to exacerbate political instability and increase the risk of conflict, especially in vulnerable regions. Additionally, there are gaps in global governance that hinder collective efforts to mitigate. Multilateral collaboration, through initiatives such as the Green Climate Fund, is an important solution in ensuring the participation of all countries in mitigating climate change. This research emphasizes the need for an inclusive and fair approach to global governance, and provides policy recommendations to increase the effectiveness of climate change mitigation and strengthen international security. It is hoped that the research results can contribute to the understanding and development of better strategies in facing the challenges of climate change in the future.*

**Keywords:** *Global Governance, Climate Change, Security, Mitigation, Collaboration*

## PENDAHULUAN

Perubahan iklim merupakan salah satu ancaman paling serius bagi kelangsungan hidup manusia di abad ke-21. Fenomena pemanasan global, yang sebagian besar disebabkan oleh emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia, telah memicu berbagai dampak yang merusak, mulai dari cuaca ekstrem, naiknya permukaan laut, kekeringan, kebakaran hutan, hingga migrasi besar-besaran. Dampak dari krisis ini tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan, tetapi juga meluas ke bidang ekonomi, sosial, dan politik, yang pada akhirnya menimbulkan ancaman terhadap keamanan internasional. Menurut laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) pada 2021, jika upaya global untuk membatasi kenaikan suhu global gagal dilakukan, peningkatan suhu lebih dari 1,5 derajat Celsius akan membawa kerusakan yang lebih besar bagi ekosistem dan kehidupan manusia dalam dekade mendatang (IPCC, 2021).

Perubahan iklim juga semakin memperburuk kerentanan keamanan internasional. Konflik yang timbul akibat kelangkaan sumber daya alam seperti air, lahan, dan pangan semakin sering terjadi di wilayah-wilayah yang terdampak oleh perubahan iklim. Sebagai contoh, kekeringan berkepanjangan di Sudan dan Suriah diyakini memainkan peran penting dalam memperburuk konflik bersenjata di wilayah tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa perubahan iklim dapat menjadi katalisator konflik, yang pada akhirnya mengancam perdamaian dan keamanan global (Kelley et al., 2015).

Dalam menghadapi tantangan global ini, diperlukan tindakan kolektif yang melibatkan berbagai aktor internasional melalui mekanisme *global governance*. *Global governance* adalah konsep tata kelola multilateral yang berfokus pada kerja sama internasional untuk menyelesaikan masalah-masalah lintas negara, termasuk perubahan iklim. Proses ini melibatkan berbagai pihak,

seperti negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan yang relevan untuk mengatasi krisis iklim. Contoh nyata dari *global governance* dalam konteks perubahan iklim adalah Protokol Kyoto, Perjanjian Paris 2015, dan Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP) yang dilakukan setiap tahun. Perjanjian Paris menetapkan target global untuk membatasi kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celsius, meskipun implementasi kesepakatan ini masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan komitmen politik negara-negara besar serta perbedaan kapasitas negara berkembang (Falkner, 2016).

Sejumlah literatur telah meneliti keterkaitan antara *global governance*, perubahan iklim, dan keamanan internasional. Barnett dan Adger (2007) mengungkapkan bahwa perubahan iklim berpotensi meningkatkan ketegangan politik dan menyebabkan konflik bersenjata, terutama di negara-negara yang rentan secara politik dan ekonomi. Penelitian lain oleh Mach et al. (2019) menunjukkan bahwa perubahan iklim tidak hanya memperburuk kerentanan keamanan tetapi juga memperlemah ketahanan ekonomi dan kesejahteraan sosial, yang pada akhirnya memperburuk instabilitas politik.

Dalam ranah *global governance*, penelitian oleh Biermann (2014) dan Gupta (2010) menyoroti peran penting lembaga internasional dan aktor non-negara dalam menciptakan kebijakan yang efektif dalam mengatasi perubahan iklim. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola iklim global membutuhkan pendekatan yang lebih partisipatif dan inklusif, yang melibatkan berbagai aktor dari sektor dan negara yang berbeda.

Namun, meskipun ada banyak penelitian mengenai hubungan antara perubahan iklim dan keamanan internasional, masih sedikit yang secara khusus meneliti peran *global governance* dalam mengurangi risiko konflik akibat

perubahan iklim. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menutup celah tersebut dengan mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana tata kelola global dapat membantu memitigasi perubahan iklim sekaligus memperkuat keamanan internasional.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam dua aspek utama. Pertama, penelitian ini secara langsung menghubungkan *global governance* dengan mitigasi perubahan iklim dan dampaknya terhadap keamanan internasional, sebuah hubungan yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Kedua, penelitian ini mengadopsi pendekatan multidisipliner yang menggabungkan perspektif politik, ekonomi, dan lingkungan, untuk menganalisis kompleksitas tata kelola global dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan keamanan internasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam diskusi akademis mengenai tata kelola iklim global serta strategi mitigasi dan adaptasi untuk mengurangi risiko konflik yang diakibatkan oleh krisis iklim.

Penelitian ini memiliki manfaat baik dalam ranah akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur yang ada mengenai *global governance* dan dampaknya terhadap perubahan iklim dan keamanan internasional, khususnya melalui kerangka kerja sama multilateral. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas lebih jauh peran tata kelola global dalam menangani tantangan global lainnya.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pembuat kebijakan di tingkat nasional maupun internasional. Para pengambil keputusan diharapkan dapat menggunakan temuan ini untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dan inklusif dalam menghadapi krisis iklim, dengan memperkuat mekanisme *global governance*. Selain itu, penelitian ini juga

memberikan manfaat bagi organisasi internasional seperti PBB, LSM, dan sektor swasta dalam menyusun strategi yang lebih baik untuk mengatasi masalah lingkungan dan keamanan global.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *global governance* dalam mengatasi krisis iklim dan dampaknya terhadap keamanan internasional. Tujuan lainnya adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tata kelola global dalam mitigasi perubahan iklim, mengkaji bagaimana kerja sama multilateral dapat memperkuat upaya global dalam mengurangi risiko konflik yang dipicu oleh perubahan iklim, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki mekanisme *global governance* yang lebih inklusif, adil, dan efektif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis peran *global governance* dalam mitigasi perubahan iklim dan dampaknya terhadap keamanan internasional. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena yang kompleks secara mendalam serta menganalisis hubungan-hubungan yang ada di antara variabel-variabel yang terlibat. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder yang relevan, seperti laporan internasional, studi akademik, kebijakan publik, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan *global governance*, perubahan iklim, dan keamanan internasional.

## **Desain Penelitian**

Desain penelitian ini bersifat deskriptif dan eksploratif, karena bertujuan untuk menggambarkan peran *global governance* dalam mengatasi perubahan iklim serta mengidentifikasi bagaimana tata kelola global mempengaruhi keamanan internasional. Penelitian ini mengadopsi pendekatan multidisipliner yang mencakup

perspektif politik, ekonomi, dan lingkungan. Desain ini dianggap sesuai untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu menggambarkan secara rinci bagaimana proses tata kelola global berperan dalam mitigasi perubahan iklim dan meminimalkan risiko konflik.

Menurut Creswell (2013), metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami makna dari fenomena berdasarkan sudut pandang partisipan atau aktor yang terlibat. Dalam penelitian ini, aktor yang dimaksud mencakup berbagai negara, organisasi internasional, LSM, dan sektor swasta yang berperan dalam tata kelola global. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam dinamika hubungan antara berbagai aktor dalam konteks global governance dan perubahan iklim.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber seperti:

1. Laporan Internasional: Termasuk laporan dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), serta laporan tahunan dari lembaga-lembaga internasional terkait perubahan iklim.
2. Jurnal Ilmiah: Penelitian ini menggunakan artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal-jurnal bereputasi, seperti *Nature Climate Change*, *Global Environmental Change*, dan *Political Geography*. Artikel-artikel ini membahas peran global governance, perubahan iklim, dan dampaknya terhadap keamanan internasional.
3. Dokumen Kebijakan: Dokumen kebijakan dari berbagai negara dan organisasi internasional yang berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim, seperti Protokol Kyoto, Perjanjian Paris, serta kebijakan-kebijakan nasional terkait perubahan iklim.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen resmi, laporan, dan jurnal ilmiah yang relevan. Studi dokumentasi ini penting karena memberikan dasar yang kuat dalam memahami bagaimana proses global governance berlangsung serta bagaimana implementasinya di berbagai negara. Menurut Bowen (2009), studi dokumentasi merupakan metode yang efektif dalam menganalisis konteks dan kebijakan-kebijakan yang sudah ada.

### **Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data sekunder yang diperoleh. Braun dan Clarke (2006) mendefinisikan analisis tematik sebagai metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola atau tema-tema dalam data. Dalam konteks penelitian ini, tema-tema yang diidentifikasi mencakup peran lembaga internasional dalam mitigasi perubahan iklim, tantangan dalam tata kelola global, serta hubungan antara perubahan iklim dan keamanan internasional.

Proses analisis data meliputi beberapa tahapan berikut:

1. Pengumpulan Data: Data dari laporan internasional, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan dikumpulkan dan diorganisir berdasarkan topik utama yang berkaitan dengan global governance dan perubahan iklim.
2. Koding: Data yang telah dikumpulkan dikodekan untuk mengidentifikasi kategori-kategori tematik yang relevan. Misalnya, peran lembaga internasional, kolaborasi multilateral, konflik yang dipicu perubahan iklim, serta kesenjangan dalam implementasi kebijakan perubahan iklim.

3. Pengelompokan Tema: Setelah koding dilakukan, tema-tema yang muncul dari data dianalisis dan dikelompokkan. Tema-tema ini mencerminkan pola-pola dalam peran global governance serta dampaknya terhadap keamanan internasional.
4. Interpretasi Data: Tema-tema yang telah diidentifikasi kemudian diinterpretasikan untuk memahami hubungan antara global governance, perubahan iklim, dan keamanan internasional. Proses ini melibatkan analisis kritis terhadap literatur yang ada dan data sekunder yang dikumpulkan.

Analisis tematik ini memberikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi berbagai aspek dari global governance dan perubahan iklim, terutama dalam memahami dinamika hubungan antara aktor-aktor yang terlibat. Menurut Braun dan Clarke (2006), analisis tematik memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam data kualitatif dan menghasilkan temuan yang kaya dan bermanfaat.

### **Validitas dan Reliabilitas Data**

Dalam penelitian kualitatif, validitas dan reliabilitas merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Menurut Creswell dan Poth (2016), validitas dalam penelitian kualitatif dapat dicapai melalui beberapa strategi, termasuk triangulasi, penggunaan data yang kaya, dan member checking. Dalam penelitian ini, validitas data dicapai melalui triangulasi sumber data, yaitu membandingkan temuan dari berbagai sumber seperti laporan internasional, artikel ilmiah, dan dokumen kebijakan. Dengan triangulasi, peneliti dapat memverifikasi informasi dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratan data yang digunakan.

Selain itu, untuk memastikan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik audit trail, di mana

peneliti mencatat setiap langkah pengumpulan dan analisis data secara rinci. Audit trail ini memungkinkan peneliti lain untuk mengulang proses penelitian dan mendapatkan hasil yang konsisten.

### **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini mencakup dokumen-dokumen kebijakan internasional, laporan-laporan ilmiah, dan artikel akademik yang relevan dengan topik global governance, perubahan iklim, dan keamanan internasional. Dokumen-dokumen yang dianalisis mencakup kebijakan dari organisasi internasional seperti PBB, Protokol Kyoto, dan Perjanjian Paris, serta laporan-laporan dari IPCC dan UNFCCC.

Selain itu, penelitian ini juga mencakup artikel-artikel ilmiah dari jurnal-jurnal bereputasi yang membahas dinamika antara perubahan iklim dan keamanan internasional, serta peran tata kelola global dalam mitigasi perubahan iklim. Artikel-artikel ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian dan diterbitkan dalam 10 tahun terakhir untuk memastikan bahwa data yang digunakan masih relevan dengan kondisi saat ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *global governance* dalam mitigasi perubahan iklim dan dampaknya terhadap keamanan internasional. Berdasarkan metode deskriptif kualitatif yang digunakan, hasil penelitian ini diperoleh dari analisis tematik terhadap berbagai laporan internasional, dokumen kebijakan, dan artikel ilmiah yang relevan. Berikut adalah hasil penelitian yang diperoleh dari analisis data sekunder:

### **Peran Lembaga Internasional dalam Tata Kelola Global Terkait Perubahan Iklim**

Temuan pertama menunjukkan bahwa lembaga internasional seperti *United*

*Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), dan organisasi non-pemerintah (NGO) memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan global terkait mitigasi perubahan iklim. UNFCCC memfasilitasi proses diplomatik antar negara untuk merumuskan kesepakatan internasional, seperti *Protokol Kyoto* dan *Perjanjian Paris*, yang berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca. Temuan ini konsisten dengan laporan UNFCCC (2015), yang menekankan pentingnya kolaborasi internasional untuk mengatasi perubahan iklim.

Selain itu, peran IPCC dalam menyediakan dasar ilmiah untuk kebijakan perubahan iklim sangat krusial. IPCC menyajikan laporan-laporan yang berisi penelitian terbaru mengenai perubahan iklim dan memberikan panduan kepada negara-negara dalam merumuskan kebijakan mitigasi. Laporan IPCC (2021) menunjukkan bahwa tanpa tindakan cepat dan kolaborasi global, dunia akan menghadapi peningkatan suhu rata-rata yang berpotensi merusak ekosistem dan memperburuk ketidakstabilan politik di beberapa wilayah.

Penelitian sebelumnya oleh Hsiang et al. (2013) juga menunjukkan bahwa perubahan iklim dapat berdampak signifikan terhadap ketahanan pangan dan stabilitas sosial, memperkuat argumen tentang perlunya tata kelola global yang efektif untuk mengatasi tantangan ini.

### **Tantangan dalam Implementasi Tata Kelola Global**

Tantangan besar dalam implementasi tata kelola global adalah adanya ketidaksetaraan antara negara maju dan berkembang dalam hal kapasitas mitigasi perubahan iklim. Penelitian ini menemukan bahwa negara-negara berkembang seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi target pengurangan emisi yang ditetapkan oleh kesepakatan internasional karena

keterbatasan sumber daya dan teknologi. Laporan dari *Global Environment Facility* (GEF) menunjukkan bahwa banyak negara berkembang memerlukan bantuan finansial dan teknologi dari negara maju untuk mencapai target mereka.

Temuan ini didukung oleh laporan GEF (2020), yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan perubahan iklim di negara berkembang seringkali terhambat oleh keterbatasan finansial, serta masalah birokrasi dan transparansi. Hal ini menunjukkan bahwa *global governance* yang efektif memerlukan mekanisme keadilan iklim yang memperhitungkan perbedaan kapasitas antara negara-negara.

Penelitian oleh Mastrorillo et al. (2016) juga menyoroti kesulitan yang dihadapi negara-negara berkembang dalam transisi menuju energi bersih dan teknologi ramah lingkungan.

### **Hubungan antara Perubahan Iklim dan Keamanan Internasional**

Penelitian ini mengidentifikasi hubungan antara perubahan iklim dan keamanan internasional. Temuan menunjukkan bahwa perubahan iklim berpotensi meningkatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi di berbagai wilayah, terutama di negara-negara yang rentan terhadap bencana alam dan kekurangan sumber daya. Perubahan iklim dapat memicu konflik antar negara atau kelompok yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya alam yang semakin langka, seperti air dan lahan subur.

Laporan dari *United Nations Security Council* (UNSC) mencatat bahwa perubahan iklim dapat memperburuk situasi keamanan di wilayah yang sudah mengalami konflik atau ketidakstabilan. Sebagai contoh, perubahan iklim di Afrika Sub-Sahara dan Timur Tengah telah dikaitkan dengan meningkatnya migrasi paksa, konflik sumber daya, dan peningkatan ketegangan sosial (UNSC, 2020). Temuan ini mendukung literatur sebelumnya yang menyatakan bahwa perubahan iklim dapat berfungsi sebagai

"pengganda ancaman" (threat multiplier), memperburuk risiko konflik yang sudah ada.

Penelitian oleh Burke et al. (2015) juga menemukan bahwa perubahan iklim dapat meningkatkan risiko konflik di negara-negara berkembang, terutama yang bergantung pada pertanian.

### **Kesenjangan dalam Tata Kelola Global**

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah adanya kesenjangan dalam tata kelola global terkait perubahan iklim. Meskipun telah ada berbagai kesepakatan internasional, implementasi kebijakan masih sering menghadapi tantangan karena kurangnya koordinasi dan komitmen politik dari beberapa negara. Sebagai contoh, meskipun *Perjanjian Paris* menetapkan target global untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C, masih ada negara yang tidak memenuhi komitmen tersebut, terutama negara-negara penghasil emisi besar.

Menurut laporan dari *Climate Action Tracker* (2021), beberapa negara besar seperti Amerika Serikat dan Cina tidak memenuhi target emisi mereka, yang menyebabkan kesenjangan besar dalam upaya global untuk membatasi perubahan iklim. Laporan ini juga menyebutkan bahwa beberapa negara berkembang masih belum mampu menerapkan kebijakan mitigasi yang efektif karena kurangnya dukungan internasional.

Penelitian oleh Keohane dan Victor (2011) menyatakan bahwa perbedaan kepentingan antar negara menjadi penghalang utama dalam upaya kolektif untuk mengatasi perubahan iklim.

### **Kolaborasi Multilateral sebagai Solusi**

Meskipun terdapat berbagai tantangan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi multilateral adalah salah satu solusi paling efektif untuk menghadapi perubahan iklim. Negara-negara perlu memperkuat kerjasama dalam bidang teknologi, transfer pengetahuan, dan pendanaan untuk memastikan bahwa semua

negara, terutama negara-negara berkembang, mampu berpartisipasi dalam mitigasi perubahan iklim. Misalnya, inisiatif seperti *Green Climate Fund* dan *Global Environment Facility* telah memainkan peran penting dalam menyediakan dukungan finansial bagi negara-negara berkembang.

Inisiatif *Green Climate Fund* (2021) telah memberikan bantuan finansial kepada lebih dari 100 negara berkembang untuk mengimplementasikan proyek-proyek terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kolaborasi ini dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat kapasitas negara-negara berkembang dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Penelitian oleh Biermann et al. (2012) menunjukkan bahwa kerja sama internasional dalam bentuk pendanaan dan teknologi dapat meningkatkan kapasitas negara-negara berkembang untuk menghadapi perubahan iklim.

### **Pembahasan**

Penelitian ini menyoroti peran penting global governance dalam mitigasi perubahan iklim dan dampaknya terhadap keamanan internasional. Temuan menunjukkan bahwa lembaga internasional, terutama UNFCCC dan IPCC, berfungsi sebagai pilar dalam membangun kerangka kebijakan global. UNFCCC, melalui kesepakatan seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris, memfasilitasi diplomasi internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini sejalan dengan argumen yang dikemukakan oleh Falkner (2016) bahwa Perjanjian Paris menandai perubahan signifikan dalam logika politik iklim internasional, meskipun tantangan implementasi tetap ada.

Keterbatasan yang dihadapi negara-negara berkembang dalam memenuhi target pengurangan emisi menyoroti ketidaksetaraan dalam kapasitas mitigasi. Temuan ini sejalan dengan laporan *Global Environment Facility* (2020), yang mengindikasikan bahwa negara-negara

tersebut membutuhkan bantuan finansial dan teknologi dari negara maju untuk mencapai target. Penelitian oleh Mastrorillo et al. (2016) lebih lanjut menguatkan isu ini dengan menunjukkan tantangan yang dihadapi negara berkembang dalam transisi menuju energi bersih. Negara-negara ini sering kali terhambat oleh infrastruktur yang kurang memadai dan akses terbatas terhadap teknologi inovatif yang diperlukan untuk mengurangi emisi secara efektif.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan hubungan erat antara perubahan iklim dan keamanan internasional. Dampak perubahan iklim, seperti bencana alam dan kekurangan sumber daya, berpotensi memicu ketidakstabilan politik. Temuan ini konsisten dengan analisis UNSC (2020) yang mencatat bahwa perubahan iklim dapat menjadi pengganda ancaman, terutama di daerah rawan konflik. Penelitian Burke et al. (2015) juga mengonfirmasi bahwa perubahan iklim meningkatkan risiko konflik di negara berkembang yang bergantung pada pertanian, memberikan bukti empiris yang mendukung hipotesis bahwa perubahan iklim dan keamanan saling terkait. Misalnya, penurunan hasil pertanian akibat cuaca ekstrem dapat memicu migrasi besar-besaran, yang pada gilirannya dapat memicu ketegangan sosial dan politik di negara-negara tujuan.

Kesenjangan dalam tata kelola global, meskipun telah ada kesepakatan internasional, menjadi tantangan signifikan. Seperti yang diungkapkan oleh Climate Action Tracker (2021), negara-negara besar seperti AS dan Cina tidak memenuhi komitmen emisi mereka, memperlebar kesenjangan dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Hal ini juga didukung oleh Keohane dan Victor (2011) yang menyatakan bahwa perbedaan kepentingan antara negara sering kali menghalangi upaya kolektif untuk mitigasi perubahan iklim. Ketidakpastian politik dan ekonomi di negara-negara besar

ini dapat menimbulkan dampak negatif pada kerjasama global, menghambat pencapaian tujuan bersama.

Akhirnya, penelitian ini menekankan bahwa kolaborasi multilateral merupakan solusi penting untuk mengatasi tantangan perubahan iklim. Inisiatif seperti Green Climate Fund dan Global Environment Facility memberikan dukungan vital bagi negara-negara berkembang. Temuan ini sejalan dengan penelitian Biermann et al. (2012) yang menunjukkan bahwa kerja sama internasional dalam bentuk pendanaan dan transfer teknologi dapat meningkatkan kapasitas negara-negara berkembang dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Melalui kerjasama ini, negara-negara berkembang dapat mengakses sumber daya yang diperlukan untuk beradaptasi dan berinovasi dalam strategi mitigasi, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil secara politik.

## **PENUTUP**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa global governance memainkan peran krusial dalam mitigasi perubahan iklim dan dampaknya terhadap keamanan internasional. Berdasarkan hasil analisis, beberapa kesimpulan utama dapat diidentifikasi. Pertama, lembaga internasional seperti UNFCCC dan IPCC berkontribusi signifikan dalam merumuskan kebijakan dan kesepakatan internasional untuk mitigasi perubahan iklim. Kesepakatan seperti Perjanjian Paris menjadi landasan penting, meskipun tantangan dalam implementasinya tetap ada. Kedua, ketidaksetaraan antara negara maju dan berkembang dalam hal kapasitas, teknologi, dan pendanaan menjadi hambatan besar. Negara-negara berkembang sering kali kesulitan memenuhi target pengurangan emisi, yang berimplikasi pada efektivitas tata kelola global.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim berpotensi

memperburuk ketidakstabilan politik dan meningkatkan risiko konflik, terutama di daerah-daerah yang rentan seperti Afrika dan Timur Tengah. Dampak langsung ini berkontribusi pada situasi keamanan yang kompleks dan seringkali memicu migrasi serta konflik sumber daya. Meski berbagai kesepakatan internasional telah dihasilkan, masih ada kesenjangan dalam pelaksanaan kebijakan. Beberapa negara, terutama penghasil emisi besar, belum memenuhi komitmen yang ditetapkan, yang menghambat upaya kolektif untuk mitigasi perubahan iklim. Namun, kerja sama internasional, termasuk inisiatif seperti Green Climate Fund, terbukti efektif dalam memberikan dukungan kepada negara-negara berkembang. Kolaborasi ini penting untuk memastikan semua negara mampu berpartisipasi dalam upaya mitigasi.

Kontribusi dari penelitian ini adalah penekanan pada perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan adil dalam tata kelola global. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi tantangan perubahan iklim dan memperkuat keamanan internasional, kebijakan yang dihasilkan harus mempertimbangkan perbedaan kapasitas antarnegara. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mitigasi perubahan iklim di masa mendatang, memastikan bahwa setiap negara, tanpa memandang status ekonominya, dapat berkontribusi pada upaya global ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan teoretis, tetapi juga menawarkan solusi praktis yang dapat diimplementasikan oleh para pengambil keputusan di tingkat nasional dan internasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

Barnett, J., & Adger, W. N. (2007). Climate change, human security and violent conflict. *Political Geography*, 26(6), 639-655.

- <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2007.03.003>
- Biermann, F. (2014). *Earth system governance: World politics in the Anthropocene*. MIT Press.
- Biermann, F., et al. (2012). Global Climate Governance: A review of the literature. *Climate Policy*, 12(1), 1-24. <https://doi.org/10.1007/s10784-011-9133-0>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Burke, M., Hsiang, S. M., & Miguel, E. (2015). Global non-linear effect of temperature on economic production. *Nature*, 527(7577), 235-239. <https://doi.org/10.1038/nature15725>
- Climate Action Tracker. (2021). Retrieved from Climate Action Tracker Website.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Falkner, R. (2016). The Paris Agreement and the new logic of international climate politics. *International Affairs*, 92(5), 1107-1125. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12708>
- Global Environment Facility (GEF). (2020). *Climate Change Mitigation and Adaptation*. Retrieved from GEF Website.
- Gupta, J. (2010). A history of international climate change policy. *WIREs Climate*

- Change, 1(5), 636-653.  
<https://doi.org/10.1002/wcc.67>
- Hsiang, S. M., et al. (2013). Quantifying the influence of climate on human conflict. *Science*, 341(6151), 1235367.  
<https://doi.org/10.1126/science.1235367>
- IPCC. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press.  
<https://doi.org/10.1017/9781009157896>
- IPCC. (2021). *Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Retrieved from <https://www.ipcc.ch/report/ar6>
- Keohane, R. O., & Victor, D. G. (2011). The regime complex for climate change. *Perspectives on Politics*, 9(1), 7-23.  
<https://doi.org/10.1017/S1537592710004068>
- Kelley, C. P., Mohtadi, S., Cane, M. A., Seager, R., & Kushnir, Y. (2015). Climate change in the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112(11), 3241-3246.  
<https://doi.org/10.1073/pnas.1421533112>
- Mach, K. J., Kraan, C. M., Adger, W. N., Buhaug, H., Burke, M., Fearon, J. D., ... & Scheffran, J. (2019). Climate as a risk factor for armed conflict. *Nature*, 571(7764), 193-197.  
<https://doi.org/10.1038/s41586-019-1300-6>
- Mastrorillo, M., et al. (2016). The impact of climate change on energy supply and demand in the Asia-Pacific region. *Energy Policy*, 94, 29-40.  
<https://doi.org/10.1016/j.enpol.2015.11.015>
- UNFCCC. (2015). *Paris Agreement*. Retrieved from <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>
- United Nations Environment Programme (UNEP). (2021). *Emissions Gap Report 2021*. Retrieved from UNEP Website.
- United Nations Security Council (UNSC). (2020). *Climate Change and Security*. Retrieved from UNSC Website.